

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. bahwa pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat belum dilaksanakan secara optimal sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya hak dan kesejahteraan masyarakat hukum adat;
- c. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat saat ini masih bersifat parsial dan sektoral sehingga perlu dibentuk suatu undang-undang yang komprehensif agar dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat hukum adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

Mengingat:

Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:       UNDANG-UNDANG TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok warga negara Indonesia yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
2. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah tim teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

3. Pengakuan adalah keputusan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat melalui serangkaian proses yang dimulai dari tahap indentifikasi, verifikasi dan validasi, sampai dengan penetapan oleh Menteri.
4. Pelindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
5. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat.
6. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam baik yang di atasnya maupun yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Hukum Adat.
7. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu.
8. Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan Wilayah Adatnya beserta sumber daya alam di atasnya maupun yang terkandung di dalamnya sesuai dengan hukum adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.
10. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat

istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat.

11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

#### Pasal 2

Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat berasaskan:

- a. partisipatif;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan dan tanpa diskriminasi;
- d. transparansi;
- e. kemanusiaan;
- f. kepentingan nasional;
- g. keselarasan;
- h. keberagaman;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 3

Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;
- b. memberikan jaminan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;

- c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari keanekaragaman kebudayaan nasional;
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
- f. menjadikan Masyarakat Hukum Adat sebagai penerima manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional.

## BAB II PENGAKUAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

##### Pasal 4

- (1) Negara mengakui Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

##### Pasal 5

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi dan validasi; dan
- c. penetapan.

##### Pasal 6

- (1) Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Pusat melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Masyarakat Hukum Adat yang diidentifikasi harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia dalam komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial yang telah ada sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mendiami suatu Wilayah Adat dengan batas tertentu secara turun-temurun;
- c. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat; dan/atau
- d. mempunyai Lembaga Adat yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Kedua  
Panitia Masyarakat Hukum Adat

Pasal 7

- (1) Bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berada di 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. organisasi perangkat daerah kabupaten/kota;
  - b. perwakilan Masyarakat Hukum Adat;
  - c. perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat;
  - d. akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat; dan
  - e. perwakilan kantor yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan.
- (3) Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. organisasi perangkat daerah provinsi terkait;
  - b. perwakilan Masyarakat Hukum Adat;
  - c. perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat;
  - d. akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat; dan
  - e. perwakilan kantor yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan.
- (3) Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 9

- (1) Menteri membentuk panitia untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat pusat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) provinsi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. kementerian terkait;
  - b. perwakilan Masyarakat Hukum Adat;
  - c. perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat; dan
  - d. akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Bagian Ketiga Identifikasi

#### Pasal 11

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta batas Wilayah Adat dan Tanah Ulayat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

#### Pasal 12

- (1) Identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
- (2) Identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi.
- (3) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat yang berada di 2 (dua) atau lebih provinsi dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat.

#### Pasal 13

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat.
- (2) Pengumuman hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Selama masa pengumuman, masyarakat dapat mengajukan keberatan dengan melampirkan bukti dan/atau data yang mendukung.

- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi, atau Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat sesuai dengan tingkat kewenangannya.

#### Bagian Keempat Verifikasi dan Validasi

##### Pasal 14

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan administrasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.
- (2) Pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan administrasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemeriksaan atas keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama masa pengumuman.

##### Pasal 15

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi, dan Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi, Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi, atau Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat dapat:
  - a. meminta Masyarakat Hukum Adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan; dan
  - b. memeriksa keberatan dan bukti pendukung yang diajukan masyarakat dalam masa pengumuman.
- (3) Verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi.
- (5) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota dan Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi menyampaikan berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah setelah menerima berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat rekomendasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri untuk diberikan Pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat.
- (7) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melampirkan berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat menyampaikan berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri untuk diberikan Pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat.

#### Bagian Kelima Penetapan

##### Pasal 16

- (1) Menteri menetapkan Masyarakat Hukum Adat beserta Wilayah Adat dan Tanah Ulayat berdasarkan surat rekomendasi dan berita acara verifikasi dan validasi dalam bentuk Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat rekomendasi dan berita acara verifikasi dan validasi.

##### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara identifikasi, verifikasi dan validasi, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB III EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Pusat dapat melakukan evaluasi terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat membentuk panitia evaluasi.
- (3) Panitia evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. kementerian terkait;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. perwakilan Masyarakat Hukum Adat;
  - d. perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat; dan
  - e. akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Evaluasi pertama dilakukan 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditetapkannya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan berikutnya akan dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Panitia evaluasi Masyarakat Hukum Adat melakukan evaluasi atas Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

#### Pasal 19

- (1) Panitia evaluasi melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Menteri dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat tidak memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berdasarkan laporan hasil evaluasi panitia, bupati/walikota, gubernur atau Menteri melakukan pembinaan terhadap Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Dalam hal pembinaan telah dilaksanakan dan persyaratan Masyarakat Hukum Adat tetap tidak dapat dipenuhi, Menteri menetapkan penghapusan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Paragraf 1 Hak Atas Wilayah Adat

##### Pasal 20

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas Wilayah Adat yang dikuasai dan dikelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

##### Pasal 21

Masyarakat Hukum Adat berhak berpartisipasi dan terwakili dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal.

#### Paragraf 2 Hak Atas Sumber Daya Alam

##### Pasal 22

Masyarakat Hukum Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan Hukum Adat, kearifan lokal, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau korporasi dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam di Wilayah Adat yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak berdasarkan pertimbangan Masyarakat Hukum Adat melalui musyawarah.
- (2) Masyarakat Hukum Adat berhak mendapatkan kompensasi atas pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
  - b. tanah pengganti;
  - c. permukiman kembali;
  - d. kepemilikan saham; atau
  - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat Hukum Adat berhak menerima manfaat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan prioritas Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Paragraf 3 Hak Atas Pembangunan

Pasal 24

Masyarakat Hukum Adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan nasional.

- Pasal 25
- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak berpartisipasi dalam kebijakan program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Wilayah Adat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (2) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (3) Masyarakat Hukum Adat berhak menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan bersama.
- (4) Masyarakat Hukum Adat berhak mengusulkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan di Wilayah Adat berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 4  
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 26

Masyarakat Hukum Adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan.
- (2) Unsur kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian hak kekayaan intelektual yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Masyarakat Hukum Adat mengajarkan unsur kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada generasi pewarisnya.
- (4) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan unsur kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
  - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
  - c. penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 29

Masyarakat Hukum Adat wajib:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budaya sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia;
- c. bertoleransi antar-Masyarakat Hukum Adat dan dengan masyarakat lain;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;
- f. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- g. menjaga dan tidak mengalihkan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat kepada pihak luar Masyarakat Hukum Adat;
- h. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional: dan
- i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PELINDUNGAN

### Pasal 30

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah memperoleh penetapan berhak atas Pelindungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Hukum Adat.

### Pasal 31

Pelindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. Pelindungan terhadap Wilayah Adat;
- b. Pelindungan sebagai subyek hukum;
- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;

- d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola Wilayah Adat;
- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat;
- g. pelestarian dan perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
- i. perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat yang menjalankan pekerjaan tradisional di wilayah adatnya.

## BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

### Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat.

### Pasal 33

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pelestarian unsur kebudayaan dan kekayaan intelektual;
  - c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat;
  - d. usaha produktif; dan
  - e. kerjasama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan; dan
  - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian unsur kebudayaan dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pendaftaran unsur kebudayaan dan kekayaan intelektual sebagai hak kekayaan intelektual Masyarakat Hukum Adat;
  - b. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada Masyarakat Hukum Adat;
  - c. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
  - d. pemberian penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. akses pemasaran produk ke luar Wilayah Adat;
  - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pembentukan dan pengembangan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
  - b. pembentukan koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha Masyarakat Hukum Adat; dan
  - c. pemberian bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha Masyarakat Hukum Adat.
- (6) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. fasilitasi kerja sama antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain;
  - b. pengembangan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
  - c. penempatan Masyarakat Hukum Adat sebagai mitra yang setara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII  
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Pemerintah Pusat

Pasal 34

Pemerintah Pusat bertugas:

- a. membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat;
- b. menetapkan Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam undang-undang ini;
- c. menyusun kebijakan perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- d. menyusun kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- e. menyusun kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada Masyarakat Hukum Adat;
- f. menyusun rencana tata ruang wilayah; dan
- g. menyusun sistem data nasional yang memuat informasi mengenai sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan budaya tradisional yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 35

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Pemerintah Pusat berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat;
- b. menetapkan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- c. menetapkan kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada Masyarakat Hukum Adat;
- d. menetapkan kebijakan pembinaan Masyarakat Hukum Adat;
- e. menetapkan rencana tata ruang wilayah nasional; dan
- f. mengevaluasi secara berkala keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah

Pasal 36

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi atau Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota;
- b. melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat;
- f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Hukum Adat;
- h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal disekitarnya;
- i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif Tanah Ulayat;
- j. membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Pengakuan, Pelindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- k. menyusun dan mengesahkan informasi geospasial tematik tanah Masyarakat Hukum Adat; dan
- l. melakukan penataan kesatuan wilayah Masyarakat Hukum Adat.

#### Pasal 37

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan program daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat;
- c. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat;
- d. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;

- e. menetapkan program Pelindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Hukum Adat; dan
- f. menetapkan rencana tata ruang wilayah daerah.

## BAB VIII LEMBAGA ADAT

### Pasal 38

- (1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

### Pasal 39

Lembaga Adat bertugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Hukum Adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan mediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Hukum Adat;
- c. memberikan putusan atas penyelesaian sengketa adat;
- d. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Hukum Adat;
- e. meningkatkan peran aktif Masyarakat Hukum Adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
- f. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara Masyarakat Hukum Adat dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 40

Lembaga Adat berwenang:

- a. mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat;
- b. mewakili kepentingan Masyarakat Hukum Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan

- c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat.

#### Pasal 41

Lembaga Adat bekerjasama secara sinergis dengan pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

### BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

#### Bagian Kesatu Sengketa Internal Masyarakat Hukum Adat

##### Pasal 42

- (1) Sengketa internal dalam Masyarakat Hukum Adat diselesaikan oleh Lembaga Adat.
- (2) Penyelesaian sengketa oleh Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan putusan Lembaga Adat.
- (3) Putusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

#### Bagian Kedua Sengketa Antar Masyarakat Hukum Adat

##### Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap Hukum Adat yang dilakukan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang lain diselesaikan melalui Lembaga Adat tempat terjadinya pelanggaran.
- (2) Sengketa antar Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui Musyawarah Adat antar-Lembaga Adat.
- (3) Dalam hal Musyawarah Adat antar-Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan melalui pengadilan.

#### Bagian Ketiga Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat dan Pihak Lain

##### Pasal 44

- (1) Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain diselesaikan oleh Lembaga Adat melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan putusan penyelesaian sengketa.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa diselesaikan di pengadilan.

#### Pasal 45

Dalam hal penyelesaian sengketa tidak melalui Musyawarah Adat antar-Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), gugatan tidak dapat diterima di pengadilan.

### BAB X SISTEM INFORMASI

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
  - b. menjadi dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - c. mendukung penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. data dan informasi mengenai Masyarakat Hukum Adat;
  - b. program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
  - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
  - d. evaluasi terhadap hasil Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.

- (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan Satu Data Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 47

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendanaan bagi Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 48

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan Pengakuan, Pelindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- d. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- e. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Adat;
- f. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- g. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk Masyarakat Hukum Adat;

- h. melestarikan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Hukum Adat;
- i. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Hukum Adat;
- j. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat; dan
- k. membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat kepada Masyarakat Hukum Adat.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 49

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau bermaksud memiliki sebagian atau seluruh wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 50

Setiap Orang yang menghalang-halangi Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adatnya sesuai dengan hukum adat, kearifan lokal, dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 51

Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan terhadap Masyarakat Hukum Adat di wilayah keistimewaan atau kekhususan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diakui dan dilindungi menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah sebelum tanggal berlakunya Undang-Undang ini, selanjutnya diakui dan ditetapkan oleh Menteri sebagai Masyarakat Hukum Adat berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua istilah Masyarakat Hukum Adat yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, harus dimaknai sebagai Masyarakat Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- b. semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai atau berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat sebelum diundangkannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 54

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Masyarakat Hukum Adat sering juga disebut dengan istilah lain, seperti masyarakat adat, masyarakat tradisional, masyarakat pribumi, atau orang asli. Masyarakat Hukum Adat tersebut memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun dalam satu wilayah tertentu yang sudah ada sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dasar susunan Masyarakat Hukum Adat yaitu kesatuan ikatan genealogis dan teritorial. Berdasarkan sejarah hukum ketatanegaraan Indonesia yang telah menghapus feodalisme, pengaturan tentang Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang ini tidak termasuk pemerintahan swapraja dan bekas kesultanan.

Pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat secara konstitusional telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 18B ayat (2) tersebut memberikan syarat bahwa pengakuan dan penghormatan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya dilakukan sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dengan undang-undang.

Dalam perkembangannya keberadaan Masyarakat Hukum Adat mengalami beberapa permasalahan. *Pertama*, keberagaman istilah mengenai Masyarakat Hukum Adat dalam beberapa peraturan perundang-undangan merujuk pada indikator serta persyaratan yang berbeda sehingga sulit dalam proses Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan dari pemerintah. Dampaknya, kedudukan Masyarakat Hukum Adat rentan terhadap kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, keterbatasan akses terhadap pelayanan publik terutama infrastruktur pembangunan, dan ketertinggalan infomasi. *Kedua*, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan cenderung memprioritaskan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga berdampak terhadap belum terpenuhinya hak-hak masyarakat hukum adat seperti hak atas wilayah adat, hak atas tanah, hutan, sumber daya alam, ekonomi, hukum, dan budaya. Selain itu, Masyarakat Hukum Adat juga belum dilibatkan dalam program pembangunan terutama mengenai dampak yang dapat ditimbulkan terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Ketiga*, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat belum memiliki standar yang sama dan belum sesuai dengan kearifan lokal sehingga program pemberdayaan yang dilakukan menjadi tidak optimal, kurang terkoordinasi, dan tidak berkesinambungan. *Keempat*, Masyarakat Hukum Adat masih mengalami konflik antar-Masyarakat Hukum Adat, masyarakat, maupun Pemerintah. Selain itu penyelesaian konflik terkait dengan Masyarakat Hukum Adat sering mengalami benturan ketika hukum adat dihadapkan dengan hukum nasional yang berdampak pada penyempingan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai mekanisme pengakuan Masyarakat Hukum Adat melalui proses

identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini yang kemudian legalitasnya akan ditetapkan oleh Menteri. Setelah memperoleh penetapan, Masyarakat Hukum Adat berhak mendapat Pelindungan atas haknya dan Pemberdayaan. Pelindungan atas hak-hak Masyarakat Hukum Adat meliputi hak atas Wilayah Adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup. Selain hak juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi Masyarakat Hukum Adat. Adapun pengaturan Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat. Untuk mempermudah kegiatan Pemberdayaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Hukum Adat.

Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini juga diatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga wajib menyediakan anggaran bagi Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu diatur mengenai Lembaga Adat sebagai penyelenggara Hukum Adat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai ketentuan pidana terhadap perbuatan yang menghalang-halangi Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan maupun sumber daya alam dan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau bermaksud memiliki sebagian atau seluruh wilayah adat dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Undang-Undang ini juga mengakui dan melindungi Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan terhadap Masyarakat Hukum Adat di wilayah keistimewaan

atau kekhususan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah Masyarakat Hukum Adat berperan aktif dalam terwujudnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan melalui keterlibatan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang berdampak terhadap Masyarakat Hukum Adat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada Masyarakat Hukum Adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan tanpa diskriminasi” adalah setiap orang memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia dan berdasarkan martabat yang melekat pada setiap pribadi manusia. Oleh karena itu, tidak seorang pun harus mengalami diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, usia, bahasa, orientasi seksual, agama, pandangan dan sikap politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan, sosial atau geografis, disabilitas, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan

informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan Pelindungan hak Masyarakat Hukum Adat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak serta kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks Masyarakat Hukum Adat perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah Pengakuan dan Pelindungan seluruh keberagaman Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya sebagai pengikat dan pemersatu NKRI serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah upaya Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat harus mengharmoniskan Masyarakat Hukum Adat beserta perangkat pranata dan lembaga yang dimilikinya untuk berperan serta dalam pembangun nasional.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas ”keberagaman” adalah Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan melalui penghormatan dan pemeliharaan perbedaan suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan serta sistem nilai yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat, namun dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah upaya Pelindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan memperhatikan dan menghargai karakteristik, sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya, pengetahuan tradisional, dan nilai-nilai luhur adat istiadat yang terkandung dalam Masyarakat Hukum Adat sebagai warisan turun-temurun.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup" adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pranata” adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi seperti adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku.

Yang dimaksud dengan “perangkat hukum” adalah tata aturan yang memiliki sanksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kementerian terkait antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman hasil identifikasi dimaksudkan untuk menentukan subjek Masyarakat Hukum Adat dan objeknya yang menjadi karakteristik Masyarakat Hukum Adat yang akan ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kementerian terkait antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah usaha atau tindakan bupati/walikota, gubernur, dan/atau Menteri dalam memberikan pendampingan, pengarahan, dan/atau pemberdayaan agar Masyarakat Hukum Adat dapat memenuhi kembali persyaratan serta memiliki eksistensi dan Pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat.

Huruf b.

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota Masyarakat Hukum Adat sesuai nilai kearifan lokal dimaksudkan sebatas agar anggota Masyarakat Hukum Adat tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, melestarikan adat istiadat dan budayanya serta tidak mengelola atau memanfaatkan tanah untuk tujuan komersil.

Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Sumber daya alam mencakup segala sesuatu, baik yang berada di permukaan tanah maupun di dalam tanah termasuk perairan.

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.

## Pasal 23

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "permukiman kembali" adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada pihak yang berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses Pengadaan Tanah.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "bentuk ganti kerugian melalui kepemilikan saham" adalah penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan/atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antar

pihak.

Huruf e

Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Manfaat penyelenggaraan pembangunan nasional antara lain berupa penyediaan dan kemudahan dalam mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Unsur kebudayaan antara lain tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, seni, pengetahuan tradisional, dan/atau Bahasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah undang-undang yang mengatur mengenai pemajuan kebudayaan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara antara lain menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, dan menjaga kelestarian Wilayah Adat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Pelindungan terhadap Wilayah Adat dilakukan dengan cara, antara

lain: penyusunan rencana tata ruang dan wilayah, dan pemberian Hak Ulayat terhadap Tanah Ulayat melalui sertifikat Tanah Ulayat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat antara lain dilakukan dengan cara: penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat, pembangunan infrastruktur, dan pendampingan dalam akses perbankan dan jaminan sosial.

Huruf g

Pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional antara lain melalui promosi pariwisata, pembangunan museum adat, dan penetapan daerah cagar budaya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

yang dimaksud dengan “pekerjaan tradisional” adalah pekerjaan yang secara turun temurun dipraktekkan oleh Masyarakat Hukum Adat seperti berladang, nelayan, dan pekerjaan lainnya.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah penyediaan fasilitator, pendidik, dan peran-peran teknis bagi Masyarakat Hukum Adat untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Masyarakat Hukum Adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pihak lain" antara lain: Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Korporasi, dan orang perseorangan yang bukan anggota Masyarakat Hukum Adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Data dan informasi mengenai Masyarakat Hukum Adat

antara lain mencakup sejarah, identitas, Wilayah Adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal yang dimiliki.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan Aceh, undang-undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua dan undang-undang yang mengatur mengenai daerah istimewa Yogyakarta.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...